

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	v
INTISARI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	11
1. Pengaturan Umum Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	11
2. Bentuk Pengembalian Investasi Dalam Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	14
3. Dukungan Pemerintah Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	17
B. Tinjauan Umum Jaminan Pemerintah Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	21
1. Pengertian Jaminan Pemerintah	21
2. Kedudukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Dalam Pemberian Jaminan Pemerintah Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	24
3. Hubungan Kontraktual Dan Model Bisnis PT PII	26

C. Tinjauan Umum Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum...	28
1. Infrastruktur SPAM Sebagai Objek KPBU	28
2. Dukungan Pemerintah Khusus Sektor SPAM	31
3. Pengembalian Investasi Badan Usaha Pelaksana Dalam KPBU SPAM	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Sifat Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
1. Penelitian Kepustakaan	35
2. Penelitian Lapangan	36
C. Teknis dan Alat Pengumpulan Data	37
1. Teknis Pengumpulan Data	37
2. Alat Pengumpul Data	37
3. Analisis Data	38
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penghitungan Komponen Biaya Jaminan Pemerintah Dalam Komponen Biaya Proyek pada Badan Usaha Pelaksana dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum kepada tarif air minum yang dibayarkan masyarakat....	40
1. Prinsip Alokasi Risiko Dalam Konteks Implementasi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dan Pengitungan Biaya Imbal Jasa Penjaminan	40
2. Pembebanan Biaya Imbal Jasa Penjaminan kepada Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Sebagai Komponen Biaya Investasi	48
B. Pengaruh pembebanan komponen biaya Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum terhadap tarif air minum yang dibayarkan masyarakat dikaitkan dengan asas penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum serta prinsip kemanfaatan sesuai dengan Perpres 38/2015	51

1. Air Minum Sebagai Kekayaan Alam yang dikuasai Negara dan Hak Asasi Manusia	51
2. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	54
3. Prinsip – Prinsip Penetapan Tarif Air Minum Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum	57
C. Peran serta Kementerian Keuangan dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk menjadikan pemberian Jaminan Pemerintah tidak membebani masyarakat ...	61
1. Peranan Kementerian Keuangan Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	61
2. Bentuk – Bentuk Penjaminan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	63
3. Perbandingan Mekanisme dan Bentuk Pemberian Penjaminan Pada Proyek Infrastruktur Di Dunia	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76